

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 1996, *Keterpurukan Hukum di Indonesia – Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fakhria, Efa Laela, 2015, *Perbandingan HIR dan RGB sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*, Keni, Bandung.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Harahap M. Yahya, SH. 2007, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta; Sinar Grafika.
- L..J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam,
- Lilik Mulyadi, *Hukum*, 2005, *Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, djambatan, Jakarta .
- Makarao, Moh. Taufik. 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta ;PT Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan keempat. Yogyakarta;Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Media.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1975, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung,
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung,
- Rusaid, M. Nur, 2008, *Hukum Acra Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, 1992 *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT Alumni, Bandung.
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung,
- Surwono,2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2001, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta; Rajawali.

Soekanto, Soerjono. 1983, *Acara Perdata Peradilan Negeri* Pradiya Pramita, Jakarta.
Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta,
Wirjono Prodjodikoro, 1979 *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Brazil Nomor 9099 tahun 1995.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana .

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi
Syariah.

Undang-undang Kenya Nomor 2 tahun 2016 tentang Gugatan Sederhana.

C. PRANALA LUAR

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-domisili/> diakses pada tanggal 15 oktober
2017 Pukul 20.20.

<http://www.gresnews.com/berita/tips/112148-penyelesaian-gugatan-sederhana/0/> diakses
tanggal 11 oktober 2017 Pukul 19.30.

[https://idtesis.com/metodologi-penelitian- hukum/](https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum/) diakses pada tanggal 13 Oktober 2017
Pukul 18.45.

<https://pn-balebandung.go.id/> diakses pada tanggal 11 oktober 2017 Pukul 20.20.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 11 oktober 2017 Pukul
21.15.

<http://hukum.kompasiana.com>. diakses pada 13 oktober 2017 Pukul 17.35.

<http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/upload/2014/02/prespektif-Small-Claim-Court.pdf>.
diakses pada 1 desember 2017 Pukul 12.21.

<http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uplad/2014/02/exsistensi-small-claim-court.pdf>.
diakses pada 1 desember 2017 Pukul 12.21.

<http://sipp.pn-balebandung.go.id/> diakses pada tanggal 14 januari 2018 Pukul 22.11.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19099.html diakses pada 14 januari 2018 Pukul
21.23.

<http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/TheSmallClaimsCourtNo2of2016>
diakses pada 14 januari 2018 Pukul 21.23.

D. JURNAL

Arman Tjoneng, GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI TEROBOSAN MAHKAMAH
AGUNG DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DI PENGADILAN DAN
PERMASALAHANNYA , dialogia maranatha, volume 8 Nomor 2 April 2017

